

RESEARCH ARTICLE

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat

Qaysara Elida Uzma^{1*}, Ibnu Aswat², Nina Febriana Dosinta³

^{1*2.3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.

Email: b1031221075@student.untan.ac.id^{1*}, ibnu.aswat@ekonomi.untan.ac.id², nina.febriana.d@ekonomi.untan.ac.id³

Histori Artikel:

Dikirim 20 Mei 2025; Diterima dalam bentuk revisi 1 Juni 2025; Diterima 20 Juni 2025; Diterbitkan 1 Agustus 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Uzma, Q. E., Aswat, I., & Dosinta, N. F. (2025). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(4), 2218-2228. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i4.4308>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dengan penekanan pada hambatan serta langkah-langkah strategis yang ditempuh selama pelaksanaannya. Metode kualitatif dipilih, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam bersama beberapa narasumber yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan di instansi tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun SAP berbasis akrual sudah diterapkan, masih ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan tenaga ahli yang kompeten, kurangnya pemahaman teknis mengenai akuntansi akrual, serta dukungan sistem informasi yang belum memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai strategi dilakukan antara lain pelatihan berkala, pendampingan dari lembaga teknis terkait, serta perbaikan sistem dan prosedur pelaporan keuangan berbasis akrual. Kesimpulannya, keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan teknologi, serta komitmen pimpinan instansi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan mutu pelaporan keuangan di sektor publik Indonesia.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan; Basis Akrual; Laporan Keuangan Pemerintah; Kejaksaan Tinggi.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of accrual based Government Accounting Standards (SAP) at the High Prosecutor's Office of West Kalimantan, focusing on the challenges and strategic measures taken during the process. A qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews with several key informants directly involved in the preparation of financial reports at the institution. The findings reveal that although accrual-based SAP has been implemented, several obstacles remain, such as limited competent human resources, lack of technical understanding of accrual accounting, and inadequate supporting information systems. To address these issues, various strategies have been adopted, including regular training, assistance from relevant technical agencies, and improvements in systems and procedures supporting accrual-based financial reporting. The study concludes that the success of SAP implementation largely depends on human resource readiness, technological support, and leadership commitment. These findings are expected to contribute to improving the quality of public sector financial reporting in Indonesia.

Keyword: Government Accounting Standards; Accrual Basis; Government Financial Reports; High Prosecutor's Office.

1. Pendahuluan

Sistem pemerintah dan manajemen keuangan Indonesia telah mengalami transformasi besar sejak era reformasi 1998. Kebijakan desentralisasi yang ditetapkan dalam nomor hukum 23 pada tahun 2014 memberi pemerintah daerah dengan otonomi yang lebih luas, termasuk manajemen keuangan dan penciptaan gelar (Putra & Varina, 2021). Dampak perubahan ini sangat penting karena pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan secara efisien, transparan, akuntansi dan menggunakan dana publik. Dalam konteks ini, Status Akuntansi Negara (SAP) adalah alat penting sebagai pedoman untuk mempersiapkan dan menyajikan gelar negara bagian di tingkat pusat dan regional (Putra & Varina, 2021). Penerapan Standar Akuntansi Negara (SAP) diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan tahunan lembaga pemerintah dan dasar untuk Otoritas Audit Tertinggi (BPK) dalam memberikan pendapat ujian. Tanpa kecuali, Fair Opinion (WTP) adalah indikator keberhasilan manajemen keuangan yang transparan dan bertanggung jawab (Vezalin *et al.*, 2019). Selain itu, reformasi manajemen keuangan negara melalui adopsi nomor undang-undang 17 pada tahun 2003, terkait dengan keuangan negara dan nomor hukum 1, menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek manajemen keuangan negara, sehubungan dengan Kementerian Keuangan Negara. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pemerintah memberikan Peraturan No. 71 2010 oleh Pemerintah. Pemerintah mengatur penerapan standar akuntansi negara berdasarkan penjelasan, menjadikannya poin penting dalam mereformasi pelaporan keuangan dalam pelaporan keuangan negara. Dalam peraturan ini, semua perusahaan pemerintah harus menggunakan akuntansi berdasarkan penciptaan gelar. Pada saat acara, transaksi catatan akrual dan sistem akuntansi berbasis peristiwa ekonomi tidak bergantung pada uang tunai yang diterima atau tidak dibayar. Selain itu, pada tahun 2013, Menteri Dalam Negeri menerbitkan apa kewajiban pemerintah daerah untuk menciptakan tujuh gelar terpenting pada pernyataan. Dalam praktiknya, implementasi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah maupun lembaga pemerintah lainnya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian-penelitian sebelumnya mengidentifikasi sejumlah kendala utama, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami SAP berbasis akrual, keterbatasan teknologi informasi, hingga kompleksitas proses pelaksanaan (Hladika *et al.*, 2013; Thersya Henukh *et al.*, 2020). Selain itu, perubahan paradigma dari basis kas menuju basis akrual memerlukan penyesuaian yang tidak mudah, baik dari sisi pemahaman konsep maupun adaptasi sistem pelaporan keuangan (Warda, 2016; Nasihuddin & Agustina, 2020).

Kejaksaa Tinggi sebagai lembaga penegak hukum negara sekaligus entitas pemerintah, memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan negara, khususnya dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN. Kejaksaa Tinggi tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum, tetapi juga bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, dalam implementasinya, Kejaksaa Tinggi Kota Pontianak masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM yang memahami SAP berbasis akrual, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta resistensi terhadap perubahan sistem pelaporan. Proses adaptasi dari basis kas ke basis akrual seringkali menimbulkan kebingungan dan resistensi di kalangan pegawai, karena memerlukan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep akuntansi pemerintahan (Nasihuddin & Agustina, 2020; Warda, 2016). Dukungan dari kepemimpinan dan komitmen organisasi juga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi SAP. Tanpa komitmen yang kuat untuk kepemimpinan, upaya untuk mengimplementasikan SAP seringkali setengah berpikiran dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, peran kepemimpinan dalam memberikan arahan, motivasi dan alokasi sumber daya menentukan keberhasilan implementasi SAP di sekitar jaksa penuntut (Prayogo *et al.*, 2023; Purnamasari *et al.*, 2020). Studi sebelumnya telah berfokus pada penerapan SAP di pemerintah daerah atau kementerian, tetapi investigasi terhadap penerapan SAP di lembaga penegak hukum seperti jaksa penuntut masih sangat terbatas. Faktanya, karakteristik dan tantangan penegakan hukum mungkin berbeda dari yang ada di negara bagian lain. Ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang harus diisi untuk memastikan bahwa implementasi SAP dilakukan secara merata di seluruh perusahaan pemerintah (Pracko *et al.*, 2023; Purnamasari *et al.*, 2020).

RESEARCH ARTICLE

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAP dilakukan di SAPS yang diakui di berbagai daerah sesuai dengan peraturan, tetapi masih menghadapi tantangan seperti sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi, dan komunikasi antar-lembaga (Putra & Varina, 2021; Thesya Henukh *et al.*, 2020). Implementasi yang sukses juga sangat bergantung pada komitmen manajer dan pelatihan berkelanjutan, tetapi keterbatasan teknis seperti jaringan dan anggaran tetap ditantang (Vezalin *et al.*, 2019). Selain itu, sistem akuntansi dan teknologi informasi yang tepat dan akuntan yang kompeten sangat penting dalam mendukung implementasi SAP berbasis SAP (Sartika, 2019; Zuliayana *et al.*, 2023). Namun, di banyak daerah, tidak semua komponen yang diperlukan sepenuhnya terpenuhi. B. Laporan Perubahan Deklarasi Kredit dan Arus Kas Anggaran (Hasmah, 2016; Mailangkay *et al.*, 2023; Reu, 2024; Sumanti *et al.*, 2022). Fokus dari penelitian ini adalah bahwa jaksa penuntut kota Pontianak telah berhasil mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diciptakan untuk mengatasi hambatan yang muncul, dan telah mengidentifikasi tantangan dan solusi spesifik. Solusi alternatif yang diusulkan dalam berbagai studi termasuk meningkatkan pelatihan dan keterampilan SDM, memperkuat infrastruktur teknologi informasi, dan meningkatkan komitmen dan dukungan kepada para pemimpin organisasi (Hladika *et al.*, 2013; Henukh *et al.*, 2020). Dari opsi-opsi ini, solusi yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari mengidentifikasi faktor-faktor kunci untuk keberhasilan implementasi SAP berbasis SAP di jaksa penuntut kota Pontianak dan mengembangkan struktur kapasitas dan strategi sistem dukungan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat implementasi SAP berbasis akrual di Kejaksaan Tinggi Kota Pontianak, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola keuangan di institusi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan, serta menjadi referensi bagi lembaga penegak hukum dalam meningkatkan sistem akuntansi berbasis akrual di Indonesia, khususnya di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kota Pontianak.

Secara operasional, penelitian ini mencakup pedoman dan prosedur dalam persiapan gelar keuangan untuk implementasi standar akuntansi negara (SAP) berdasarkan standar akuntansi (SAP), aplikasi keseluruhan prinsip penagihan, pedoman dan prosedur dalam persiapan gelar keuangan, termasuk nomor peraturan negara 71 laporan, dan laporan tentang peraturan untuk laporan 2010-2010-2010. 2010. Studi ini didasarkan pada banyak teori terkait, salah satunya adalah teori agen, yang pertama kali dibesarkan oleh Bell dan Agen 1932 (Mizruuchi, 2004) dan diselesaikan oleh Jensen & Meckling (1976) untuk menjelaskan hubungannya dengan partai yang dapat dipercaya (Eisenhardt, 1989). Dalam hal ini, jaksa penuntut umum di Kalimantan Barat harus menjadi agen dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik kepada pemerintah daerah sebagai kepala sekolah. Implementasi SAP yang tak tertahankan menurut PP No. 71 tahun 2010 berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas. Hal ini memungkinkan tingkat penciptaan yang lebih transparan dan lebih akurat, mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas (Noreen, 1988). SAP adalah perlakuan pemerintah standar dalam persiapan transaksi (Mardiadasmo, 2009:148) dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas laporan keuangan tahunan dan akuntabilitas keuangan (Hasanah & Fauzi, 2017). Basis diferensiasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PP No, 71 Tahun 2010, mencatat transaksi dan peristiwa saat terjadi tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pengeluaran kas, sehingga menyajikan gambaran kinerja keuangan yang lebih menyeluruh dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat (Prasetya & Indrayeni, 2021). Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Lembaga penegak hukum memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara di wilayahnya, yang saat ini dipimpin oleh Ahelya Abustam, S.H., M.H. sejak April 2025 (Bodan, 2024). Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoretis dalam memperkaya literatur mengenai implementasi SAP di sektor publik, tetapi juga nilai praktis dalam memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi perbaikan tata kelola keuangan di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan lembaga pemerintah lainnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus untuk memperoleh pemahaman intelektual tentang penerapan standar akuntansi negara sesuai PP No. 71 Tahun 2010 di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tahun 2010. Metode kualitatif dipilih karena mampu menangkap dinamika dan kompleksitas fenomena dalam konteks alamiah (*natural environment*) dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tindakan (Sugiyono, 2013). Data dikumpulkan dengan wawancara dengan personel struktural, karyawan keuangan, manajer akuntansi terpilih, pengamatan langsung dari proses implementasi SAP BA, dan survei dokumen untuk penjelasan keuangan dan formal terkait. Data yang dikumpulkan termasuk data utama dari wawancara dan pengamatan, serta data sekunder dalam bentuk laporan keuangan resmi dari negara bagian penuntut tinggi Kalimantan Barat. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan menggabungkan berbagai metode dan sumber data secara bersamaan (Sugiyono, 2013). Sampel atau sumber daya dipilih sampai titik saturasi tercapai. Ini berarti bahwa data yang Anda ambil bukanlah informasi baru. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan citra proses, tantangan, dan faktor yang komprehensif dan dapat diandalkan yang mempengaruhi implementasi SAP BA di Kantor Penuntut Umum Tinggi di Kalimantan Barat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Wawancara pada Sub Bagian Keuangan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat

No	Pertanyaan	Kepala Sub Bagian Keuangan	Staff Pengelola Penanganan Perkara	Kepala Urusan Akuntansi dan Keuangan
1	Apakah Anda mengetahui SAP berbasis akrual?	Mengetahui dari pelatihan dan implementasi	Mengetahui, karena sudah diterapkan di instansi tempat bekerja	Mengetahui, ada sosialisasi dari Kemenkeu dan instansi internal
2	Bagaimana cara memperoleh pemahaman SAP berbasis akrual?	Pelatihan dari BPKP dan pelatihan internal	Sosialisasi dan pelatihan teknis di kantor	Sosialisasi dari Kemenkeu dan internal 2x setahun
3	Sejauh mana pemahaman pegawai tentang akuntansi berbasis akrual?	Sudah cukup baik, tapi masih ada peningkatan	Masih ada kesenjangan pemahaman	Pegawai bisa mengikuti sistem karena sudah by system
4	Sistem apa yang digunakan untuk implementasi SAP berbasis akrual?	SAKTI	SAKTI dan MONSAKTI	SAKTI dari Kemenkeu digunakan semua instansi
5	Sejak kapan SAP akrual diterapkan?	Sekitar 2023 baru diterapkan secara penuh, sebelumnya masih menggunakan basis kas juga	Sejak 2023	Mulai tahun 2023, sebelumnya berbasis kas
6	Langkah strategis mendukung	Sosialisasi, pelatihan, pembentukan tim	Pelatihan dan peningkatan	Mengikuti update sistem dari

RESEARCH ARTICLE

	implementasi SAP akruar?		kapasitas SDM	Kemenkeu, ada pedoman internal dan teknis
7	Kendala dalam penerapan?	SDM dan pemahaman teknis	Koneksi jaringan dan SDM belum merata	Masalah jaringan, perbedaan persepsi antara Kejaksaan dan Kemenkeu soal uang pengganti dan lain-lain.
8	Dampak SAP akruar terhadap transparansi dan akuntabilitas?	Lebih transparan dan akuntabel	Laporan lebih tepat waktu dan sesuai standar	Lebih jelas dan praktis dalam pelaporan, by system lebih efisien
9	Harapan terhadap implementasi SAP berbasis akruar ke depan?	Peningkatan pelatihan dan penyempurnaan sistem	Sistem lebih fleksibel dan mendukung kebutuhan instansi	Penyesuaian menu di SAKTI agar sesuai dengan kondisi Kejaksaan

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar (SAP BA) di Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat merupakan proses yang cukup panjang dan bertahap. Proses ini secara formal dimulai sejak diberlakukannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun baru mulai diterapkan secara perlahan sejak tahun 2015. Meski demikian, pelaksanaan secara penuh dengan penerapan basis akruar yang komprehensif baru dapat terwujud mulai tahun 2023. Perubahan mendasar yang terjadi pada tahun 2023 adalah peralihan penuh dari sistem pelaporan berbasis kas ke sistem berbasis akruar. Sebagaimana disampaikan oleh Kasubbag keuangan;

"Sebelumnya kami masih menerapkan basis kas, tahun 2020 baru mulai berubah ke basis akruar namun belum secara penuh. Basis akruar baru diterapkan secara penuh itu tahun 2023."

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kesiapan sumber daya manusia, sistem pelaporan yang masih berkembang, serta perlunya penyesuaian terhadap jenis-jenis transaksi keuangan yang bersifat khusus di lingkungan Kejaksaan. Ketiga narasumber yang diwawancarai, yaitu Pak Beny Hartanto selaku Kepala Sub Bagian Keuangan, Pak Yudi Kurniawan selaku Kepala Urusan Akuntansi dan Keuangan, serta Ibu Chairunnisa Filza Azzahra sebagai Staf Pengelola Penanganan Perkara, menyatakan bahwa seluruh pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan telah memahami dasar-dasar akuntansi berbasis akruar. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui proses belajar mandiri, pelatihan internal, maupun sosialisasi dari instansi pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Yudi, diketahui bahwa pemahaman terhadap SAP berbasis akruar diperoleh melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Kementerian Keuangan, APPM, serta instansi internal seperti Kejaksaan Agung. Sosialisasi ini dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun, bertepatan dengan penyusunan laporan keuangan semesteran sesuai dengan yang disampaikan oleh kaur akuntansi dan keuangan;

"Jadi kita itu ada sosialisasi dari APPM, Kementerian Keuangan, dan sosialisasi dari instansi internal kita sendiri, Kejaksaan Agung. Sosialisasi itu biasanya sekalian dengan kita melakukan laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan. Itu dilakukan satu tahun dua kali per semester."

Sementara itu, narasumber Filza menyampaikan bahwa pemahaman terhadap SAP berbasis akruar diperoleh melalui pelatihan internal, bimbingan dari pegawai senior, serta tutorial dari sistem yang digunakan. Hal ini disampaikan secara langsung oleh staf pengelola penanganan perkara;

"Saya memperoleh pemahaman terkait SAP berbasis akruar ini melalui pelatihan internal dari senior, sosialisasi dari yang sudah berpengalaman sebelumnya, dan setelah membaca tutorial dari sistem juga. Kan dari kemenkeu juga ada mengirimkan bagaimana cara ngerjainnya."

RESEARCH ARTICLE

Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat perhatian yang cukup besar dari pihak manajemen terhadap peningkatan kompetensi teknis pegawai, khususnya dalam hal pemahaman terhadap SAP berbasis akrual. Pelatihan yang dilaksanakan dua kali setahun diharapkan mampu menjawab tantangan adaptasi terhadap sistem baru dan kompleksitas pencatatan berbasis akrual, seperti pencatatan penyusutan aset, piutang, dan kewajiban jangka panjang. Kegiatan pelatihan ini juga menjadi sarana diskusi dan tukar pengalaman antarstaf, sehingga pemahaman teknis dapat menyebar secara merata. Meskipun pelatihan dan sosialisasi sudah dilaksanakan secara rutin, tetap ditemukan kendala dalam pemahaman teknis pegawai terhadap konsep-konsep akuntansi berbasis akrual. Hal ini disampaikan oleh staff pengelola penanganan perkara yang menyatakan;

“Ada yang sudah paham, tapi banyak juga yang masih bingung, terutama soal penyusutan dan pencatatan piutang.”

Permasalahan ini cukup umum terjadi, mengingat penerapan basis akrual menuntut pemahaman yang lebih mendalam terkait prinsip akuntansi, klasifikasi akun, dan waktu pengakuan transaksi. Senada dengan hal tersebut, Kasubbag Keuangan juga menyampaikan;

“Kalau dibilang paham, ya cukup, tapi masih perlu ditingkatkan lagi terutama untuk staf yang baru.”

Artinya, masih diperlukan program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, terutama bagi pegawai baru yang belum memiliki pengalaman dalam penyusunan laporan berbasis akrual. Terkait dengan penggunaan teknologi dalam proses pelaporan keuangan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sepenuhnya telah memanfaatkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sistem informasi utama. Seluruh proses pencatatan dan pelaporan dilaksanakan melalui aplikasi ini, yang merupakan sistem terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Meskipun penerapan SAP berbasis akrual sudah berjalan cukup optimal, terdapat beberapa kendala teknis dan sistemik. Salah satunya adalah masalah jaringan yang memengaruhi kinerja aplikasi SAKTI. Kaur akuntansi dan keuangan sendiri menyampaikan bahwa;

“Kalau secara keseluruhan SAKTI penerapannya sudah maksimal. Cuma karena ini pakai jaringan, jadi mungkin masalahnya di jaringan saja. Servernya kadang-kadang gangguan.”

Kendala lainnya bersumber dari perbedaan persepsi antara Kejaksaan dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam hal pengakuan pendapatan negara dari uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi. Hal ini menyebabkan perbedaan pencatatan dan memerlukan penyesuaian tambahan dalam jurnal keuangan;

“Kadang persepsinya berbeda antara Kejaksaan dan Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan kalau sudah disanksi uang itu dianggap sebagai pendapatan negara. Sementara di Kejaksaan, kalau pelaku korupsi masih menjalani hukuman badan, itu belum dianggap sebagai pendapatan negara. Jadi kita harus buat jurnal lagi, jurnal balik, jurnal penyesuaian. Itu yang belum ada di SAKTI.”

Hal ini mengindikasikan bahwa SAKTI, meskipun dirancang sebagai sistem yang seragam untuk seluruh instansi pemerintah, masih belum sepenuhnya akomodatif terhadap kebutuhan khusus institusi penegakan hukum seperti Kejaksaan, yang memiliki jenis transaksi keuangan yang unik. Sebelumnya, laporan keuangan disusun dengan pendekatan kas menuju akrual, di mana pendapatan dan belanja dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Namun, sejak 2023, pelaporan sepenuhnya menggunakan basis akrual yang mencatat transaksi pada saat terjadinya hak dan kewajiban, tidak lagi bergantung pada arus kas. Kaur akuntansi dan keuangan menyampaikan;

“Sebelumnya masih kas, tapi sekarang kita sudah sepenuhnya mengadopsi basis akrual. Ini karena ada dorongan kuat dari pimpinan.”

Hal ini menunjukkan adanya peran penting dari pimpinan dalam mendorong perubahan sistem, sekaligus menandai babak baru dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kejaksaan.

RESEARCH ARTICLE

Penerapan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh. Proses implementasi dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun, dengan tahun 2023 menjadi titik balik di mana sistem akrual telah diterapkan secara menyeluruh dalam pelaporan keuangan lembaga. Peran pimpinan dalam mendukung implementasi SAP berbasis akrual di Kejaksaan juga dinilai sangat besar. Pak Beny menyampaikan bahwa pimpinan memiliki perhatian tinggi terhadap proses penyusunan laporan keuangan, baik dari aspek ketepatan waktu maupun kualitas isi laporan. Ia mengatakan;

“Pimpinan selalu mengingatkan dan memantau progres laporan keuangan kami. Itu yang membuat kami termotivasi untuk tetap disiplin.”

Dengan adanya dukungan dan pengawasan yang aktif dari pimpinan, pegawai terdorong untuk lebih serius dan teliti dalam menyusun laporan keuangan, serta lebih cepat dalam merespons permasalahan yang muncul selama proses pelaporan. Salah satu hambatan yang cukup dirasakan dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya terkait kecepatan jaringan internet dan ketersediaan perangkat. Staf pengelola penanganan perkara menyebutkan;

“Kadang jaringan lambat sekali, apalagi pas akhir bulan. Kami jadi harus input data malam hari.”

Gangguan jaringan yang terjadi pada masa-masa kritis seperti akhir bulan atau akhir tahun anggaran dapat berdampak pada keterlambatan pelaporan dan meningkatkan beban kerja pegawai. Permasalahan ini menunjukkan perlunya peningkatan dukungan infrastruktur dari pusat, agar pelaksanaan SAP berbasis akrual dapat berlangsung optimal. Dalam menghadapi berbagai tantangan teknis maupun sumber daya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah pembentukan tim kecil yang bertugas memberikan dukungan teknis kepada rekan kerja yang mengalami kesulitan. Selain itu, juga disusun pedoman-pedoman internal terutama sejak tahun 2023. Penerapan ini bukanlah proses yang terjadi secara instan, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan, dorongan struktural, serta kesiapan sumber daya manusia dan teknologi yang berkembang selama beberapa tahun terakhir. Tahun 2023 menjadi titik balik karena lembaga mulai menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual secara penuh, sebagai bentuk tanggung jawab atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Komitmen ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Tinggi telah berada dalam jalur yang selaras dengan upaya reformasi birokrasi dan akuntabilitas publik yang lebih luas. Pergeseran dari basis kas menuju basis akrual mencerminkan perubahan budaya organisasi, di mana transparansi dan akuntabilitas mulai diinternalisasi dalam praktik pengelolaan keuangan.

3.2 Pembahasan

Salah satu indikator kuat dari keseriusan lembaga dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual adalah pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi internal secara rutin. Kegiatan ini dilakukan bukan hanya sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Proses ini mencerminkan pendekatan proaktif dari manajemen untuk memastikan bahwa pegawai memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai terhadap perubahan kebijakan akuntansi. Dalam teori keagenan, Kejaksaan sebagai agen yang bertanggung jawab kepada publik (prinsipal), memiliki kewajiban menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya. Pelatihan ini menjadi bentuk mekanisme pengawasan sekaligus pengendalian internal untuk mengurangi asimetri informasi antara lembaga dan publik. Sejalan dengan itu, peningkatan kapasitas SDM juga memperkuat legitimasi lembaga dalam menjalankan fungsi pelaporannya kepada stakeholders. Penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) juga menjadi aspek penting dalam pembahasan ini. Penerapan SAKTI menandakan upaya harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dalam hal pelaporan keuangan berbasis sistem digital yang terintegrasi. Hal ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menyederhanakan proses pelaporan, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat penyusunan laporan keuangan. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh para narasumber, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi ini tetap menjadi tantangan, seperti

RESEARCH ARTICLE

keterbatasan fitur dalam menangani transaksi keuangan yang bersifat sektoral, misalnya terkait uang hasil perkara atau barang bukti. Permasalahan teknis lainnya adalah keterbatasan infrastruktur jaringan yang berdampak pada keterlambatan input data, terutama pada periode kritis seperti akhir bulan. Ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan, meskipun telah mengalami digitalisasi, masih memerlukan penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut agar benar-benar responsif terhadap karakteristik organisasi pengguna, khususnya institusi penegakan hukum seperti Kejaksaan. Keterbatasan pemahaman teknis pegawai terhadap beberapa aspek kunci dari akuntansi berbasis akrual, seperti penyusutan aset tetap, pencatatan piutang, dan pengakuan utang, menunjukkan bahwa tantangan implementasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansial. Banyak pegawai yang masih berada dalam proses adaptasi, terutama mereka yang belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi secara formal. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kurangnya kompetensi teknis menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi SAP BA di instansi pemerintah (Kusuma *et al.*, 2020; Simanjuntak *et al.*, 2023). Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan teknis diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan tersebut. Salah satunya adalah dengan memperbanyak pelatihan berbasis studi kasus, penyusunan panduan teknis internal, serta mentoring dari pegawai yang lebih berpengalaman.

Dukungan dari pimpinan instansi juga terbukti menjadi faktor krusial dalam mendorong keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual. Keterlibatan pimpinan tidak hanya terbatas pada pemberian instruksi, tetapi juga dalam bentuk pengawasan langsung, pemberian motivasi, serta evaluasi berkala terhadap kinerja laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Purnamasari *et al* (2020) yang menemukan bahwa kepemimpinan yang aktif dan partisipatif memiliki korelasi positif terhadap efektivitas implementasi konsistensi monitoring dan penguatan peran setiap pegawai, yang pada akhirnya mendorong budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. Peran pimpinan dalam proses perubahan organisasi seperti ini tidak dapat diabaikan, karena keberhasilan transformasi sistem sangat ditentukan oleh kekuatan komando dan keteladanan dari pemegang otoritas tertinggi. Persoalan yang masih menjadi perhatian serius adalah perbedaan interpretasi terkait perlakuan akuntansi atas transaksi tertentu, seperti uang hasil perkara tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa standarisasi akuntansi pemerintah masih menghadapi tantangan sektoral, di mana jenis transaksi yang tidak umum sulit untuk diakomodasi secara tepat oleh pedoman yang bersifat umum. Perbedaan interpretasi ini berisiko menimbulkan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, serta membuka peluang terjadinya kesalahan pencatatan atau bahkan maladministrasi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci dan kontekstual dari otoritas pusat untuk menjembatani kebutuhan sektoral institusi seperti Kejaksaan. Pada akhirnya, manfaat dari penerapan SAP berbasis akrual mulai dirasakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, baik dari sisi transparansi maupun akuntabilitas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan mencerminkan kondisi keuangan lembaga secara menyeluruh, termasuk aset, kewajiban, dan saldo anggaran. Hal ini memberikan dasar informasi yang lebih kuat bagi proses pengambilan keputusan dan pengawasan oleh pimpinan serta pihak eksternal. Pernyataan ini menguatkan argumen Mardiasmo (2018) bahwa sistem akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai posisi keuangan pemerintah dibandingkan basis kas. Selain itu, peningkatan kualitas laporan juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja institusi penegak hukum. Dengan demikian, meskipun implementasi SAP BA dihadapkan pada berbagai tantangan teknis dan struktural, dampak positifnya tetap signifikan dalam memperkuat tata kelola keuangan yang baik di sektor publik.

4. Kesimpulan dan Saran

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP BA) di Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan secara bertahap dan menunjukkan perkembangan positif, terutama sejak penerapan penuh pada tahun 2023. Seluruh pegawai bagian keuangan telah mendapatkan pemahaman mengenai SAP berbasis akrual melalui pelatihan dan sosialisasi rutin yang

RESEARCH ARTICLE

difasilitasi oleh Kementerian Keuangan maupun internal instansi. Penggunaan aplikasi SAKTI terbukti sangat membantu dalam proses pelaporan keuangan berbasis akrual, sehingga laporan keuangan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Namun demikian, pelaksanaan SAP BA masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, masalah teknis jaringan, serta adanya perbedaan persepsi antara Kejaksaan dan Kementerian Keuangan dalam beberapa aspek pelaporan. Upaya peningkatan kapasitas SDM dan penyempurnaan sistem terus dilakukan agar tata kelola keuangan semakin baik dan sesuai standar. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah dan pimpinan Kejaksaan Tinggi terus meningkatkan pelatihan serta pendampingan teknis bagi seluruh pegawai terkait SAP berbasis akrual, sehingga kompetensi dan pemahaman dapat semakin merata. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi, terutama jaringan internet dan sistem aplikasi, sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi SAP BA. Penyesuaian dan pengembangan fitur pada aplikasi SAKTI juga penting dilakukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan Kejaksaan serta dapat mengurangi perbedaan persepsi dalam pelaporan keuangan. Komitmen dan dukungan dari pimpinan organisasi harus tetap dijaga sebagai faktor kunci keberhasilan, termasuk dalam hal alokasi sumber daya dan motivasi pegawai. Pemerintah pusat juga diharapkan dapat memperluas sosialisasi serta forum diskusi lintas instansi agar praktik terbaik implementasi SAP BA dapat diadopsi secara merata. Artikel ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain memberikan gambaran yang komprehensif mengenai transformasi sistem pelaporan keuangan pemerintah dari basis kas ke basis akrual di lingkungan menyajikan data primer hasil wawancara langsung dengan pejabat terkait sehingga informasinya aktual dan relevan. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis, sebagai referensi untuk pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan dan perbaikan tata kelola keuangan di lembaga pemerintah. Namun, artikel ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti fokus penelitian yang masih terbatas pada satu instansi sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi, pembahasan kendala teknis yang belum mendalam terkait solusi konkret, tidak disertai analisis kuantitatif untuk memperkuat temuan kualitatif, serta penjelasan dampak implementasi SAP BA yang masih terbatas pada aspek pelaporan dan belum menyentuh aspek strategis organisasi secara luas.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat atas izin dan dukungan selama proses pengumpulan data dan wawancara dalam penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada narasumber yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi berharga terkait implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di lingkungan Kejaksaan. Terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak yang membantu, baik secara administratif maupun teknis, termasuk staf dan pegawai Subbagian Keuangan Kejaksaan Tinggi yang memfasilitasi akses data dan dokumentasi pendukung. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi peningkatan tata kelola keuangan publik, khususnya dalam penerapan SAP Berbasis Akrual.

6. Referensi

- Bodan. (2024, July 23). Kejati Kalbar sampaikan capaian kinerja Januari–Juli 2024. *Radio Republik Indonesia*.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.

RESEARCH ARTICLE

- Hasanah, & Fauzi. (2017). *Akuntansi pemerintahan*.
- Hasmah. (2016). Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas kerja guru sekolah menengah tingkat pertama negeri pada UPT Pendidikan Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. *Pena Indonesia*, 2(2).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kusuma, A., Rahman Mus, A., Lannai, D., & Korespondensi, E. (2020). Penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 pada Inspektorat Kabupaten Enrekang. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 1(2).
- Mailangkay, V., Mewengkang, R., & Rumenser, P. (2023). Evaluasi penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado. *Management and Accounting Research*.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Penerbit ANDI.
- Mizruchi, M. S. (2004). Berle and Means revisited: The governance and power of large US corporations. *Theory and Society*, 33(5), 579–617.
- Nasihuddin, A., & Agustina, R. (2020). Analisis implementasi kebijakan SAP berbasis akrual Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemerintah Kota Mojokerto. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 2(1), 61–75.
- Noreen, E. (1988). The economics of ethics: A new perspective on agency theory. *Accounting, Organizations and Society*, 13(4), 359–369.
- Prasetya, M. N., & Indrayeni, I. (2021). Analisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Dinas Pariwisata Kota Solok. *Borobudur Accounting Review*, 89–101. <https://doi.org/10.31603/bacr.4968>.
- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, 3(2), 44–58.
- Purnamasari, N. I., Antong, & Kaasran, M. (2020). Evaluasi penyajian laporan keuangan daerah berbasis akrual pada Kantor BPKAD Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2).
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *JURNAL Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>.
- Reu, F. M. (2024). Evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan laporan operasional pada Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. *Akubis: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 41–48. <https://doi.org/10.37832/akubis.v10i2.63>.
- Sartika, D. (2019). Analysis of accrual based accounting implementation based on PP No 71 of 2010 in the Office of Food and Horticulture Kab. Gowa.

RESEARCH ARTICLE

- Simanjuntak, J. M., Sriwiyanti, E., & Tarigan, W. J. (2023). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pematangsiantar. *Jurnal of Accounting USI*, 5(1), 25–45.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Penerbit Alfabeta.
- Sumanti, A. O., Sondakh, J. J., & Kapojos, P. M. (2022). Evaluasi penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 381–388.
- Thersya Henukh, I., Fathan Saleh, M., & Elvi Adelina, Y. (2020). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Kupang. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(2), 161–184.
- Veza, F., Sartika, D., & Ilyas, A. (2019). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (Studi kasus pada BPKAD Kota Padang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(2).
- Zuliyana, S., Mawaddah, A., & Hartati, R. (2023). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada laporan keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.1905/sfj.v3i1.8539>.